

PERAN ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMBERIAN KOMPETENSI TAMBAHAN (PKT) DAN UJI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI BAGI LULUSAN/CALON LULUSAN PROGRAM VOKASI DI SMKS AMAMAPARE ENERGI DAN PERTAMBANGAN MIMIKA, PAPUA TENGAH

Nilam Sry Putri

Program Studi D3 Teknik Pertambangan, Politeknik Amamapare, Timika, Papua Tengah

Corresponding Author

E-mailAddress: nilamsryp@gmail.com

ABSTRAK

Kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dan kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri (DUDI), khususnya di sektor jasa konstruksi, masih menjadi persoalan mendasar dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kegiatan pengabdian ini melaporkan pelaksanaan Pemberian Kompetensi Tambahan (PKT) dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi bagi lulusan/calon lulusan program vokasi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bina Konstruksi Nusantara bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura dan SMK Amamapare Timika pada 29 Juni 2026. Uji kompetensi dilaksanakan untuk dua skema, yaitu Juru Gambar Pemula Konstruksi Jenjang 2 dengan 14 peserta dan Juru Ukur Konstruksi Jenjang 2 dengan 10 peserta, menggunakan metode observasi/praktik secara luring. Penulis berperan sebagai Administrasi Penunjang (onsite) yang bertugas mendukung kelancaran administrasi peserta, koordinasi dokumen asesmen, serta pendampingan teknis selama pelaksanaan uji di Tempat Uji Kompetensi (TUK). Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan administratif, pelaksanaan uji kompetensi berbasis observasi/praktik, dan pelaporan hasil kepada Direktur LSP. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dukungan administrasi yang tertata menjadi salah satu faktor penentu kelancaran proses asesmen, mempercepat alur dokumentasi peserta-asesor, dan memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan vokasi, lembaga sertifikasi profesi, dan pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat di wilayah Papua Tengah.

Kata kunci: sertifikasi kompetensi; tenaga kerja konstruksi; pendidikan vokasi; administrasi uji kompetensi; Mimika

ABSTRACT

The gap between the competencies of vocational education graduates and the actual needs of the business and industrial world, particularly in the construction services sector, remains a fundamental issue in human resource development in Indonesia, including in Mimika Regency, Central Papua. This community service report describes the implementation of Additional Competency Provision (PKT) and Construction Workforce Certification Testing for graduates and prospective graduates of vocational programs, organized by the Bina Konstruksi Nusantara Professional Certification Body (LSP) in collaboration with the Regional Construction Services Center 7 of Jayapura and SMK Amamapare Timika on 29 June 2026. The competency test covered two schemes, namely Beginner Construction Drafter Level 2 with 14 participants and Construction Surveyor Level 2 with 10 participants, using an offline observation/practice method. The author served as an onsite administrative officer supporting participant administration, assessment document coordination, and technical assistance during the test at the Competency Test Site. The results indicate that organized administrative support was a determining factor in the smoothness of the assessment process, accelerated participant-assessor documentation flow, and strengthened synergy among vocational institutions, the professional certification body, and government in preparing competent, certified construction workers in the Central Papua region.

Keywords: competency certification; construction workforce; vocational education; competency test administration; Mimika

PENDAHULUAN

Pendidikan vokasi, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi vokasi, diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan kompeten sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun demikian, berbagai kajian masih memperlihatkan adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara pendidikan yang ditempuh dan kompetensi yang dituntut pasar kerja, yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja dan penalti upah bagi lulusan yang kompetensinya belum sejalan dengan kebutuhan pekerjaan (Wicaksono, Theresia, & al Aufa, 2023). Di sektor jasa konstruksi, persoalan ini terasa lebih nyata karena pekerjaan konstruksi menuntut penguasaan keterampilan teknis yang terstandarisasi, sementara sebagian besar tenaga kerja di lapangan memperoleh keterampilannya dari pengalaman kerja tanpa pengakuan formal (Amala, Utiahman, & Achmad, 2024).

Sertifikasi kompetensi kerja hadir sebagai instrumen untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Sertifikasi memberikan pengakuan formal terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja seseorang berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sekaligus menjadi bukti profesionalisme yang dipersyaratkan regulasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Studi terhadap sikap tenaga kerja konstruksi di Jawa Barat menunjukkan bahwa pemangku kepentingan pada umumnya memandang sertifikasi kompetensi kerja secara positif karena dianggap penting untuk meningkatkan profesionalisme (Sugiri & Sari, 2025). Temuan tersebut sejalan dengan hasil kajian yang menegaskan bahwa intensitas pelatihan dan sertifikasi kompetensi berkontribusi nyata terhadap peningkatan profesionalitas instruktur maupun tenaga kerja terlatih (Thayeb & Santosa, 2021).

Upaya penyelarasan (link and match) antara lembaga pendidikan vokasi dan dunia industri juga menjadi strategi kunci dalam mempercepat kesiapan kerja lulusan. Kolaborasi timbal balik antara SMK dan industri, misalnya melalui program kerja sama kurikulum dan penyediaan jalur sertifikasi, terbukti membantu menutup kesenjangan kompetensi yang dituntut pengguna lulusan

(Islamiah, Hariyati, & Murtadlo, 2022). Pada tataran kebijakan ketenagakerjaan yang lebih luas, penguatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi juga menjadi salah satu strategi pengembangan pasar kerja di kawasan Asia Tenggara dalam rangka mengurangi kesenjangan keterampilan (skill gap) di sektor formal (Yulianti & Fitriansyah, 2024).

Di wilayah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat menjadi semakin mendesak seiring pesatnya aktivitas pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Kondisi geografis dan keterbatasan akses terhadap lembaga sertifikasi profesi menjadikan penyelenggaraan uji kompetensi secara langsung di daerah, melalui skema Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, sebagai langkah strategis untuk memperluas akses sertifikasi bagi lulusan dan calon lulusan program vokasi setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan (PKT) dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bina Konstruksi Nusantara bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura dan SMK Amamapare Timika. Artikel ini melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang peran administrasi penunjang, yang menjadi bagian penting namun sering kali kurang terdokumentasikan dalam mendukung kelancaran proses sertifikasi kompetensi di lapangan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bina Konstruksi Nusantara Nomor UKA-275/BKN/SPT-UKOM/SKEMA-1 dan SKEMA-2/TIM-ASESOR-1/VI/2026 tertanggal 29 Juni 2026, yang merujuk pada surat permohonan penayangan TUK sewaktu dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura Nomor HM0503/B/Bjkw7/2026/284 tanggal 23 Juni 2026. Uji Kompetensi Angkatan ke-275 Periode Juni 2026 ini dilaksanakan di SMK Amamapare Timika, Jl. Poros Mapurujaya Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada hari Senin, 29 Juni 2026, dengan metode observasi/praktik secara luring (luar jaringan).

Uji kompetensi mencakup dua skema. Skema 1 adalah skema Juru Gambar Pemula Konstruksi Jenjang 2 dengan 14 peserta uji, di bawah tanggung jawab Asesor Koordinator Ir. Oktavianty Batto, S.T., M.T., yang memiliki kompetensi teknis Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7. Skema 2 adalah skema Juru Ukur Konstruksi Jenjang 2 dengan 10 peserta uji, dengan Asesor Wayuddin Manambun, S.T., yang memiliki kompetensi teknis Teknisi Survei Terestris Jenjang 5. Kedua skema tersebut relevan dengan kebutuhan tenaga terampil bidang juru gambar dan juru ukur yang menjadi penghubung utama antara tahap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Fajrianti Sari, Pertiwi, & Rauf, 2025).

Penyelenggaraan kegiatan melibatkan struktur pelaksana yang terdiri atas Pimpinan/Direktur SMK Amamapare Timika (Chandra Permana), Panitia sekaligus Penanggung Jawab TUK (Ir. Herman Dumatubun, S.T.), Administrasi Koordinator yang bertugas secara oncall (Sofia Agna Fiamani Ullah, S.Psi., M.Si.), serta Administrasi Penunjang yang bertugas secara onsite, yaitu penulis sendiri. Sebagai Administrasi Penunjang, penulis bertanggung jawab pada tahap persiapan berupa pendataan dan verifikasi berkas peserta uji, penyiapan perangkat pendukung asesmen (termasuk unit komputer/laptop untuk entri data peserta), serta koordinasi jadwal antara asesor, panitia TUK, dan peserta. Pada tahap pelaksanaan, penulis mendampingi proses registrasi ulang peserta, memfasilitasi kelengkapan dokumen asesmen bagi asesor pada masing-masing skema, serta membantu kelancaran teknis selama sesi observasi/praktik berlangsung. Pendekatan pelaksanaan yang terstruktur melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi ini sejalan dengan metodologi kegiatan pengabdian berbasis pelatihan dan sertifikasi kompetensi vokasi pada umumnya (Baihaqi et al., 2026).

Tahap akhir kegiatan berupa pelaporan hasil uji kompetensi oleh tim asesor kepada Direktur LSP Bina Konstruksi Nusantara, dengan tembusan kepada BNSP, Kementerian Pekerjaan Umum, LPJK, dan pihak TUK, sebagaimana diatur dalam surat tugas. Dukungan administrasi yang tertib pada tahap ini turut memastikan seluruh dokumen hasil asesmen tercatat secara akurat sebagai dasar penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta yang dinyatakan kompeten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan (PKT) dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di SMK Amamapare Timika berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh total 24 peserta pada dua skema uji. Gambar 1 memperlihatkan suasana pelaksanaan uji kompetensi, dengan meja administrasi yang menjadi pusat pendataan dan pengarsipan dokumen peserta, sementara asesor melaksanakan observasi/praktik terhadap peserta uji pada meja terpisah. Peran administrasi pada tahap ini krusial dalam memastikan setiap peserta terdata dengan benar dan dokumen pendukung, seperti portofolio dan lembar penilaian, tersedia tepat waktu bagi asesor.



Gambar 1. Suasana pelaksanaan Uji Kompetensi Juru Gambar dan Juru Ukur Konstruksi di TUK SMK Amamapare Timika, 29 Juni 2026

Ketersediaan dukungan administrasi yang responsif turut mendukung efektivitas pelaksanaan uji praktik. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa manajemen uji kompetensi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan administratif berperan penting dalam menjamin proses sertifikasi berjalan sesuai standar (Supratikta, S.S, Rachmawati, & Hanrio, 2024). Selain itu, keterlibatan tenaga administrasi onsite memungkinkan koordinasi yang lebih cepat antara peserta, asesor, dan pihak TUK dibandingkan pola koordinasi jarak jauh, sehingga potensi kendala teknis di lapangan dapat segera ditangani.

Gambar 2 menunjukkan sesi dokumentasi bersama seluruh peserta uji kompetensi beserta tim penyelenggara, yang terdiri atas perwakilan LSP Bina Konstruksi Nusantara, pihak SMK Amamapare Timika, dan tim administrasi. Seluruh peserta mengenakan seragam identitas kegiatan sebagai bagian dari standar pelaksanaan uji praktik lapangan.

Kegiatan semacam ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara lembaga sertifikasi profesi, satuan pendidikan vokasi, dan pemerintah daerah dapat memperluas akses sertifikasi bagi tenaga kerja di wilayah yang secara geografis relatif jauh dari pusat-pusat lembaga sertifikasi, sejalan dengan pentingnya penguatan pendidikan vokasi terhadap pertumbuhan dan daya saing sumber daya manusia di daerah (Herlangga Prasetya Putra Pariswari Santoso & Yustie, 2025).



Gambar 2. Dokumentasi bersama peserta dan tim penyelenggara Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di SMK Amamapare Timika

Selain aspek kompetensi teknis pada bidang gambar dan ukur konstruksi, pelaksanaan kegiatan ini juga tidak lepas dari perhatian terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama sesi observasi/praktik berlangsung, mengingat asesmen praktik lapangan berpotensi menimbulkan risiko kerja apabila tidak didampingi prosedur yang memadai. Penguatan pemahaman K3 melalui manajemen pelatihan dan asesmen kompetensi terbukti efektif meningkatkan kesiapan calon tenaga ahli muda di bidang konstruksi (Ariati, 2022), dan pendampingan administratif yang tertib turut berkontribusi pada kepatuhan prosedur tersebut, sebagaimana juga ditemukan pada kegiatan peningkatan K3 dan produktivitas pekerja konstruksi lain yang menunjukkan bahwa pendampingan terstruktur mampu menurunkan potensi perilaku kerja yang tidak aman (Zhafira, Cholida, Handayani, & Prawesthi, 2026). Prinsip serupa juga ditemukan pada sosialisasi K3 bagi pekerja konstruksi pada proyek jembatan, yang menegaskan bahwa pendampingan aktif selama pelaksanaan uji maupun pelatihan lapangan berkontribusi menekan risiko kerja (Surbakti et al., 2023).

Secara keseluruhan, keberhasilan penyelenggaraan uji kompetensi ini menegaskan bahwa peran administrasi bukan sekadar fungsi pendukung teknis, melainkan simpul koordinasi yang menjembatani kepentingan asesor, peserta, dan lembaga sertifikasi. Fungsi ini sejalan dengan kebutuhan penguatan tata kelola pendidikan vokasi berbasis kemitraan sekolah–industri–lembaga sertifikasi, yang menjadi salah satu pendekatan efektif untuk mendekatkan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di daerah dengan akses layanan sertifikasi yang masih terbatas seperti Kabupaten Mimika (Misbahudin & Asmaul, 2022; Bramantiya & Nurhadi, 2024).

PENUTUP

Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan (PKT) dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi bagi lulusan/calon lulusan program vokasi di SMK Amamapare Timika, Kabupaten Mimika, yang diselenggarakan oleh LSP Bina Konstruksi Nusantara bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura, telah berjalan lancar dengan melibatkan 24 peserta pada skema Juru Gambar Pemula Konstruksi dan Juru Ukur Konstruksi Jenjang 2. Peran administrasi penunjang yang dijalankan penulis, mulai dari pendataan peserta, koordinasi dokumen asesmen, hingga pendampingan teknis selama uji praktik, terbukti menjadi faktor pendukung penting kelancaran pelaksanaan asesmen di lapangan. Kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan vokasi, lembaga sertifikasi profesi, dan pemerintah dalam memperluas akses sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi di wilayah Papua Tengah, sekaligus menjadi kontribusi nyata perguruan tinggi vokasi terhadap pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung penyediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berdaya saing.

REFERENSI

- Amala, I., Utirahman, A., & Achmad, F. (2024). Analisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kompetensi pekerja konstruksi bangunan gedung di Provinsi Gorontalo. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(2).
- Ariati, N. (2022). Peningkatan kemampuan calon ahli muda K3 konstruksi melalui manajemen pelatihan dan kompetensi K3

- konstruksi. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 6(1), 1–6.
<https://doi.org/10.36982/jam.v6i1.2072>
- Baihaqi, I., Supomo, H., Pribadi, T. W., Pribadi, S. R. W., Ramadhan, A. P., Hidayatullah, S. H., Pratama, R. W., Saifurrahman, M., Zahra, N. A., Putri, F. A. S. M., Ramadhani, P., Wijaya, R. A., Saputra, T. W. M., Andiantoro, B. A., & Ibrahim, A. F. (2026). Pelatihan pengelasan praktis berbasis industri untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK di sekitar Keputih Surabaya. *Sewagati*, 10(1), 73–88.
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v10i1.9016>
- Bramantiya, A. W., & Nurhadi, D. (2024). Eksplorasi daya saing lulusan SMK kompetensi keahlian teknik pengelasan kelas industri PT. INKA melalui sertifikasi welder (studi kasus di SMK Negeri 1 Bendo). *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3), 4193–4202.
- Fajrianti Sari, Pertiwi, N., & Rauf, B. A. (2025). Kompetensi siswa SMK bidang juru ukur untuk memenuhi kebutuhan kerja bidang konstruksi. *Jurnal Pendidikan Teknik Sipil dan Arsitektur*, 2(2).
- Herlangga Prasetya Putra Pariswari Santoso, & Yustie, R. (2025). Analisis pengaruh pendidikan vokasi SMK, jumlah tenaga pendidik dan jumlah satuan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2023. *Widya Balina*, 10(2), 21–33.
<https://doi.org/10.53958/wb.v10i2.868>
- Islamiah, N., Hariyati, N., & Murtadlo, M. (2022). Strategi SMK dalam menjalin kerjasama reciprocal dengan industri dan dunia kerja. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(2), 180–189.
- Misbahudin, A. R., & Asmaul, R. (2022). Upaya meminimalkan gap antara kompetensi lulusan SMK dengan tuntutan dunia industri. *WAKTU: Jurnal Teknik UNIPA*, 20(1), 12–14.
- Sugiri, T., & Sari, D. Y. (2025). Sikap tenaga kerja konstruksi terhadap sertifikasi kompetensi kerja di Provinsi Jawa Barat. *Prosiding TAU SNARS-TEK: Seminar Nasional Rekayasa dan Teknologi*, 5(1), 79–86.
- Supratikta, H., S.S, M. A., Rachmawati, I. R., & Hanrio, T. H. (2024). Analisis demografi dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas industri perdagangan berbasis KKNi dalam perencanaan SDM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 50–67.
- Surbakti, A. A., Dasrizal, Brilian, M., Rizalitaheer, A. S., Signori, I., & Widodo, W. (2023). Socialization of occupational health and safety (K3) for workers construction on bridge projects. *Indonesian Journal of Society Development*, 2(1), 23–32.
<https://doi.org/10.55927/ijds.v2i1.3175>
- Thayeb, E., & Santosa, B. (2021). Pengaruh sertifikasi kompetensi, intensitas pelatihan dan pengalaman mengajar terhadap profesionalitas instruktur balai latihan kerja. *Taman Vokasi*, 9(2), 167–177.
<https://doi.org/10.30738/jtvok.v9i2.10294>
- Wicaksono, P., Theresia, I., & al Aufa, B. (2023). Education–occupation mismatch and its wage penalties: Evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(3).
- Yulianti, D., & Fitriansyah, A. (2024). Employment and skill development initiatives in the labor markets: The cases of Indonesia and Thailand. *Journal of Policy Studies*, 39(1), 41–55.
- Zhafira, T., Cholida, N. F. F., Handayani, I. D., & Prawesthi, W. A. (2026). Peningkatan K3 dan produktivitas pekerja konstruksi pada proyek rumah kos. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 5(1), 88–96.
<https://doi.org/10.55123/abdikan.v5i1.7158>